



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.12.11 / 6 / SK/ DLH / I / 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka Kelancaran Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa mereka yang disebut namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/II/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum namanya pada kolom 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini,

KEDUA : Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Menetapkan rencana pelaksanaan meliputi:
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Menandatangani Kontrak;
- f. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- g. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak, dan
- h. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMBINA ANGGARAN,



Yusuf Andi Makkaraka, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip : 19650406 198603 1 017

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.12.11 / 6 / SK/ DLH / I / 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS
KEGIATAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	NAMA PEJABAT TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAR KABUPATEN LUWU TIMUR			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.360.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.480.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.840.000,00	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.280.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ABN	3.577.779.612,00	MAHYUDDIN, ST., MM
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	117.130.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.155.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.615.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.400.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
11	Penyediaan Komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.325.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.168.000,00	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.899.500,00	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000,00	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.800.000,00	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.506.600,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
17	Pengadaan Mebel	55.500.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.470.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.139.288,00	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	62.060.000,00	MAHYUDDIN, ST., MM
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	
24	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	19.646.000,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	NAMA PEJABAT TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
1	2	3	4
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	199.565.000,00	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP
26	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	324.221.690,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota			
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	146.364.100,00	ESTI PURWANINGSIH, S.Si
28	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten	878.205.525,00	KASMAHATIR, SE
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
29	Pelaksanaan Rehabilitasi	96.394.950,00	ESTI PURWANINGSIH, S.Si
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
30	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	147.908.860,00	AHYAR HAERUDDIN, SE., M.Tr.A.P
PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Penyimpanan Sementara Limbah B3			
31	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.854.010,00	AHYAR HAERUDDIN, SE., M.Tr.A.P
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin Pplh Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
32	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	43.985.000,00	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP
33	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.520.000,00	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
34	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	87.289.900,00	ESTI PURWANINGSIH, S.Si
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
35	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	26.659.950,00	ESTI PURWANINGSIH, S.Si
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
36	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	56.264.950,00	ESTI PURWANINGSIH, S.Si
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
37	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	34.838.000,00	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP
38	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.670.000,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	NAMA PEJABAT TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Pengelolaan Persampahan			
39	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	64.438.910,00	AHYAR HAERUDDIN, SE., M.Tr.A.P
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	115.730.000,00	DARIUS OTTO, SKM
41	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.628.746.220,00	

Malili, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



DRS. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 630406 198603 1 017